



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2
0
2
5



LAPORAN KINERJA

Triwulan I Tahun 2025

DEPUTI BIDANG KOORDINASI

PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, atas tersusunya Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Bulan Januari s.d Maret Tahun 2025. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian Indikator Kinerja Sasaran Program baik berupa capaian *output* dan capaian *outcome*.



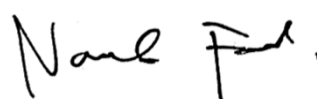
Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 Sasaran Program, 5 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai *outcome*, dan 19 *Output* Kinerja. Pelaksanaan dari PK tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disusun oleh Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Capaian 5 Indikator Kinerja Sasaran Program Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan pendukung, antara lain 1). Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; 2). Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 3). Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; 4). Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang; 5). Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerja sama kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja pada Triwulan Pertama Tahun 2025, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada Triwulan Kedua Tahun 2025.

Jakarta, April 2025

Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan
Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang


Nazib Faizal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan I Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Bulan Januari s.d Maret Tahun 2025. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian Indikator Kinerja Sasaran Program baik berupa capaian *output* dan capaian *outcome*.

Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 Sasaran Program, 5 Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebagai *outcome*, dan 19 Output Kinerja. Pelaksanaan dari PK tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah disusun oleh Unit Kerja Eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Capaian 5 Indikator Kinerja Sasaran Program Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan pendukung, antara lain 1). Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; 2). Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; 3). Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; 4). Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang; 5). Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi penyelesaian beberapa isu yang merupakan direktif dari Menko Infra di bidang pemerataan pembangunan wilayah, bidang agraria dan bidang tata ruang.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Organisasi	2
1.3. Peran Strategis	4
1.4. Sumber Daya	6
1.4.1. Sumber Daya Manusia	6
1.4.2. Sarana dan Prasarana	6
1.4.3. Sumber Daya Keuangan	7
1.5. Sistematisasi Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025	13
2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025	14
2.4. Pengukuran Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	21
3.2. Analisa Keuangan	25
3.3. Analisa Sumber Daya	28
3.3.1. Pegawai	28
3.3.2. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)	29
BAB IV PENUTUP	31
3.1. Kesimpulan	31
3.2. Kendala	32
3.3. Tindak Lanjut dan Rekomendasi	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025	6
Tabel 2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025	8
Tabel 3. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025.....	13
Tabel 4. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Sampai Akhir Triwulan I Tahun 2025.....	14
Tabel 5. Indikator Program, Output Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025.....	15
Tabel 6. Matrik Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	2
Gambar 2. Pohon Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan tropis dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang luas lautnya mencapai 5,8 Juta Km² dimana terdiri dari 3,1 juta km² perairan teritorial serta 2,7 juta km² perairan ZEE (Dishidros, 2015). Salah satu prioritas utama Presiden dalam rangka penguatan infrastruktur nasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur nasional demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 yang mandiri dan sejahtera serta meningkatkan pembangunan pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa terpencil yang kurang tersentuh oleh pembangunan infrastruktur yang masif sesuai visi dan misi Presiden tahun 2025-2029 maka pada tanggal 8 November 2024 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

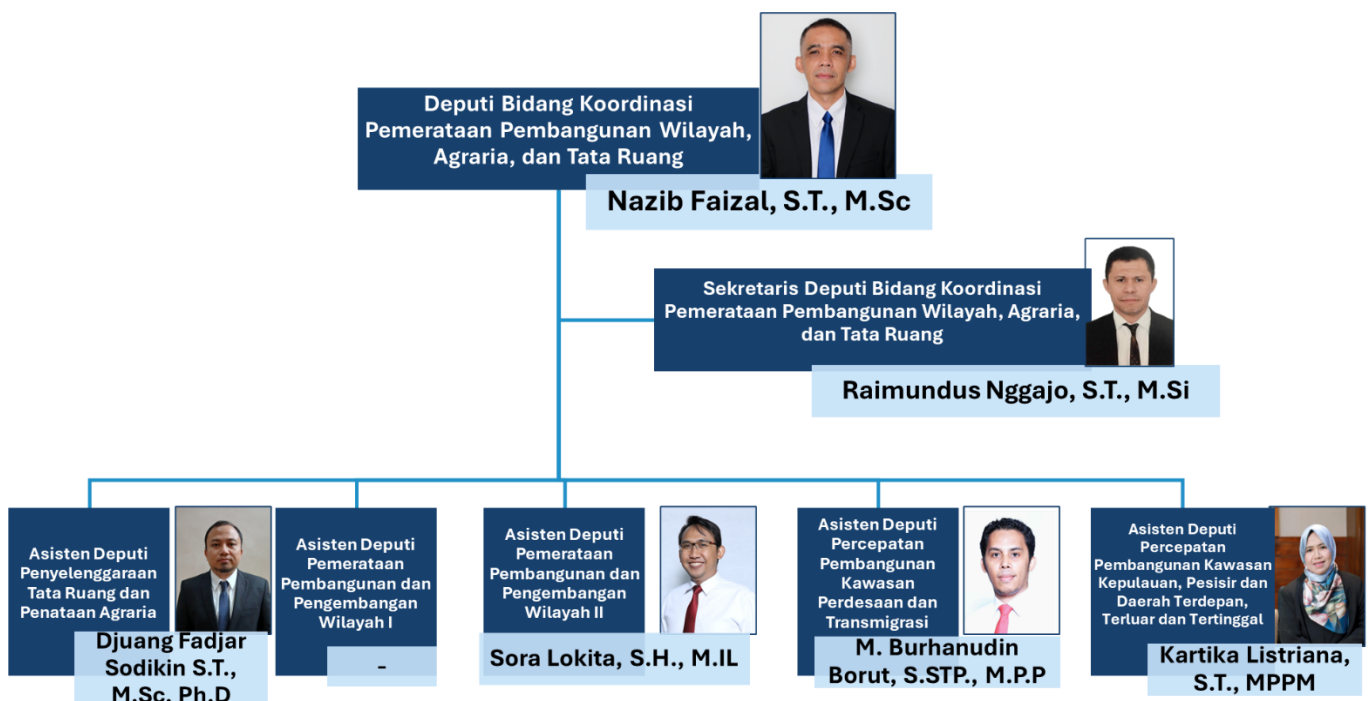
Tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Peraturan Presiden diatas adalah Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut maka diwujudkan dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I yang membantu pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan Permenko diatas.

1.2. Organisasi

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berdasar Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah, terdiri dari 6 (enam) unit kerja Eselon II antara lain : Asisten Deputy Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria, Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I, Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II, Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Pedesaan dan Transmigrasi, Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal serta Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang dapat dilihat pada Gambar. 1 dibawah ini.



GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA DAN TATA RUANG

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
2. Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
5. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sedangkan Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon II pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang adalah

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria

Memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja, pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi, pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, keuangan, pemberian dukungan layanan pimpinan, pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara, penyusunan laporan, dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria (Asdep 1)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria.

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I (Asdep 2)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I yang meliputi wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali.

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II (Asdep 3)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II yang meliputi Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi (Asdep 4)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi.

Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (Asdep 5)

Melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

1.3. Peran Strategis

Peran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah mendukung Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang untuk menajamkan pemahaman visi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan

Pembangunan Kewilayahan, sebagai bentuk semangat fundamental yaitu mewujudkan Indonesia dengan pendapatan yang semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antarwilayah yang semakin kecil, infrastruktur yang terintegrasi dan merata, serta kemiskinan akut berhasil dientaskan.

Dalam kerangka pemenuhan tujuan strategis pemerataan pembangunan wilayah, agraria dan tata ruang, maka perlu dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia”, yang diukur dari indikator kinerja Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;

2. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas.

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia”, yang diukur dari dua indikator kinerja, yaitu

- a) Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
- b) Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

3. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini merupakan sasaran strategis dari tujuan pertama “Implementasi reformasi birokrasi dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)”, yang diukur dari dua indikator kinerja, yaitu

- a) Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
- b) Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata

Ruang fokus pada 5 (lima) Isu dalam bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria, Isu bidang penyelenggaraan tata ruang dan penataan agraria, Isu bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah I (Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali), Isu bidang pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah II (Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua), Isu bidang percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi dan Isu bidang percepatan pembangunan kawasan kepulauan, pesisir, dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

1.4. Sumber Daya

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 total berjumlah 70 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 57 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 13 orang. Jumlah Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang.

1.4.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1 Sarana dan Prasarana Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang			Lantai 7
1.	Ruang Deputy	1	Sebelah Selatan
2.	Ruang Asisten Deputy	5	Sebelah Selatan
3.	Ruang Sekretaris Deputy	1	Sebelah Selatan
4.	Ruang Jabatan Fungsional Ahli Madya	14	Sebelah Utara
5.	Ruang Jabatan Fungsional Muda, Pertama, dan Staf Lainnya	1	Sebelah Utara

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
6.	Ruang Rapat Dewa Ruci (Ruang Rapat Eselon I dan II)	1	Sebelah Selatan
7.	Ruang Rapat Kecil (Umum)	1	Sebelah Utara
8.	Ruang Pengaduan Layanan Masyarakat	1	Sebelah Selatan
9.	Ruang Pantry (Dapur)	1	Sebelah Timur
10.	Toilet	5	Sebelah Barat

1.4.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025, mengalami Efisiensi Anggaran di Bulan Januari 2025 berdasarkan ND.30.1/SESMENKO/PR.01.01.00/I/2025 Hal. Efisiensi Belanja di Lingkup Kemenko Infra TA.2025 tanggal 30 Januari 2025. Namun pada Bulan Maret 2025 mendapatkan Anggaran dan ditetapkan berdasarkan ND.22.3/SESMENKO/PR.01.04/IV/2025 Hal. Penyampaian Alokasi Anggaran Pasca Buka Blokir Efisiensi Belanja Kemenko Infra 2025 tanggal 22 April 2025 sebesar Rp.3.300.000.000,-. Perincian Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2. dibawah ini.

Tabel 2. Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN (Rp.)
Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	3.300.000.000
Asisten Deputy Hukum Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria	400.000.000
Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I	400.000.000
Asisten Deputy Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II	400.000.000
Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi	400.000.000
Asisten Deputy Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	400.000.000

Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	915.223.000
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	384.777.000

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja ini adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumber daya serta sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2025, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang realisasi kinerja, anggaran dan kinerja lainnya dalam Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang.

1. Realisasi kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan I Tahun 2025, akan diuraikan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.
2. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan I Tahun 2025, akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.
3. Realisasi Kinerja lainnya akan diuraikan capaian kinerja lainnya yang meliputi tugas tambahan program dan kegiatan dari direktif pimpinan kepada

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan I Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Triwulan I Tahun 2025 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025, Laporan Ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang bulan Maret 2025, Laporan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Bulan Maret Tahun 2024; Data dukung lainnya terhadap pencapaian kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tahun 2025-2029 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Visi dan misi pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan dapat dicapai dengan pelaksanaan tujuan pembangunan yang terencana dan sistematis. Salah satu tujuan pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang akan dilaksanakan Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

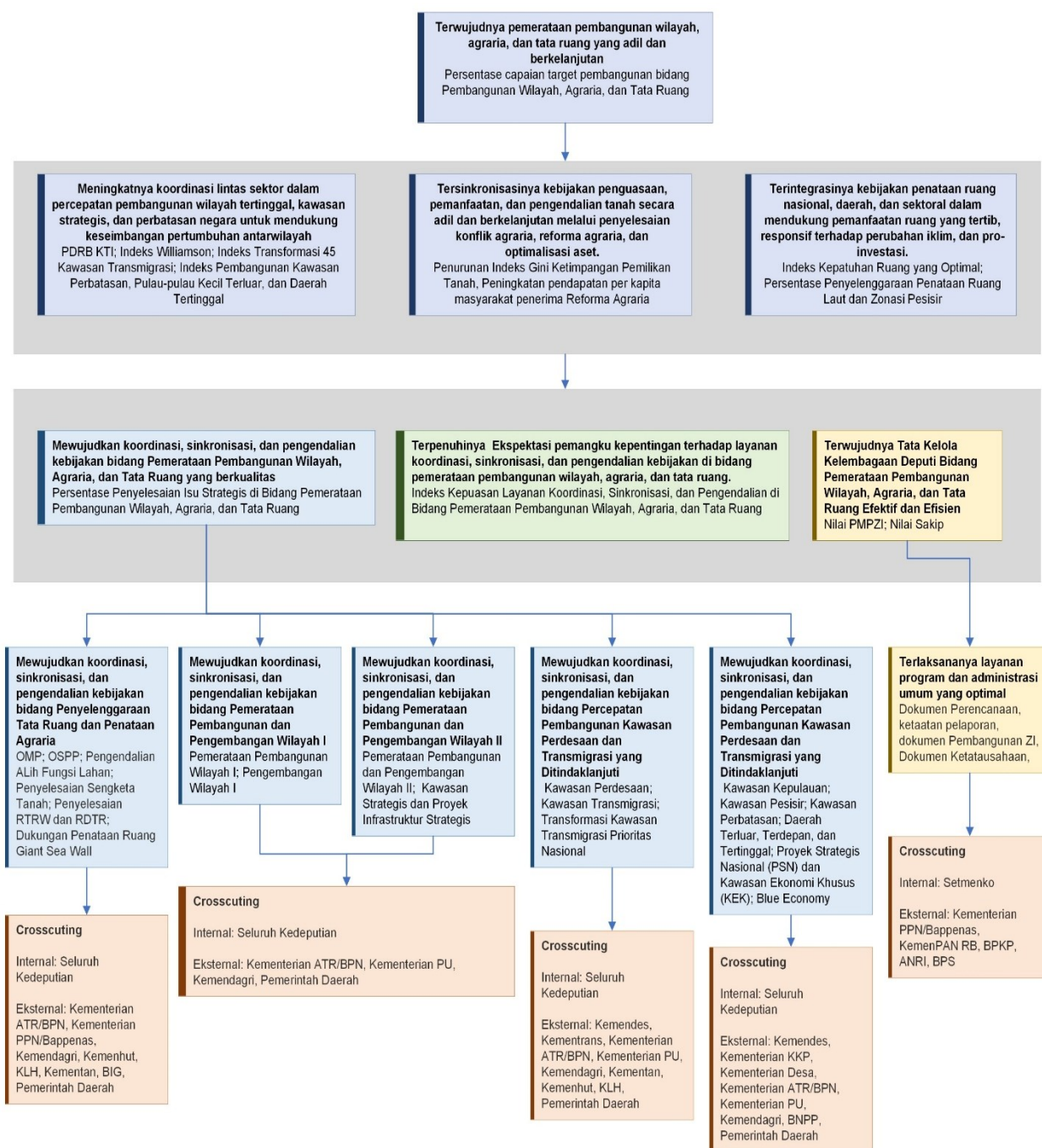
Oleh karena itu visi tahun 2025-2029 Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang adalah mewujudkan Indonesia dengan pendapatan yang semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat, kesenjangan antarwilayah yang semakin kecil, infrastruktur yang terintegrasi dan merata, serta kemiskinan akut berhasil diatasi.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam lima tahun, sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1	Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia	1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Merata dan Berkelanjutan.
		2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Berkualitas
2	Implementasi reformasi birokrasi dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang Efektif dan Efisien

Untuk membangun rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja, serta untuk membantu organisasi memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, maka Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menyusun pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 2 Pohon Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang



Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang terbagi ke dalam 3 (tiga) *leveling outcome*, yaitu *Ultimate outcome*, *Immediate outcome* dan *Intermediate outcome*. Kinerja tersebut memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk masing-masing *leveling outcome* dengan 1 (satu) sasaran program. *Ultimate outcome* melalui 1 (satu) sasaran program, *Immediate outcome* dengan 1 (satu) sasaran program; serta *Intermediate outcome* dengan 1 (satu) sasaran program sebagaimana pada Tabel 2.1. berikut

Tabel 3 Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target Kinerja	Target Renstra 2025
Ultimate outcome					
SP.1	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP.1.1	Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	100%	100%
Immediate outcome					
SP.2	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastrukturr dan Pembangunan Wilayah.	100%	100%
		IKSP.2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3,1	3,1
Intermediate outcome					
SP.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang yang berkualitas	IKSP.3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	91
		IKSP.3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan	91	91

			Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		
Output					

2.2. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025 memiliki 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan terdiri dari 5 kegiatan yakni:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan tata ruang dan penataan agraria;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi;
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal.

Penyusunan anggaran Triwulan I Tahun 2025, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025, mengalami Efisiensi Anggaran di Bulan Januari 2025 berdasarkan ND.30.1/SESMENKO/PR.01.01.00/I/2025 Hal. Efisiensi Belanja di Lingkup Kemenko Infra TA.2025 tanggal 30 Januari 2025. Namun pada Bulan Maret 2025 mendapatkan Anggaran dan ditetapkan berdasarkan ND.22.3/SESMENKO/PR.01.04/IV/2025 Hal. Penyampaian Alokasi Anggaran Pasca Buka Blokir Efisiensi Belanja Kemenko Infra 2025 tanggal 22 April 2025 sebesar Rp.3.300.000.000,-. Perincian Anggaran

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025.

Tabel 4 Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Sampai Akhir Triwulan I Tahun 2025

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	3.300.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan tata ruang dan penataan agraria	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah I	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerataan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah II	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Dan Transmigrasi	400.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan Pesisir dan Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal	400.000.000
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	915.223.000
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang	384.777.000

2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang maka menghasilkan perjanjian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025, sebagai alat untuk mengukur kinerja kedeputian selama satu tahun. Indikator program dan Output Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 5. Indikator Program, Output Kinerja dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi
Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

Indikator Program		Output Kinerja		Target	Frekuensi
IKSP 1.1	Persentase capaian target pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata RuangFor	Perumusan Persentase terdiri dari :		100%	Tahunan
		Pemerataan Pembangunan Wilayah			
		1	Indeks Williamson		
		2	Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi		
		3	Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil, Terluar, dan Daerah Tertinggal		
		Agraria:			
		4	Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah		
		5	Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat penerima Reforma Agraria		
		Tata Ruang			
		6	Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal		
7	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir				
IKSP 2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah.	1	One Spatial Planning Policy (OSPP)	100%	Tahunan
		2	Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)	100%	Tahunan
		3	Pengembangan Kawasan Pesisir Utara Jakarta	100%	Tahunan
		4	Pengembangan Kawasan Kertajati dan Rebana	100%	Tahunan
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	100%	Tahunan
		6	Blue Economy	100%	Tahunan
		7	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nasional	100%	Tahunan
		8	Pengembangan Kawasan Desa	100%	Tahunan
		9	Pengembangan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, dan Perbatasan Negara	100%	Tahunan
IKSP 2.2	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3,1	Tahunan	
IKSP 3.1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas	91	Tahunan	

	(PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	(PMPZI) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		
IKSP 3.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	Tahunan

Tabel 6 Matrik Dukungan Pencapaian Kinerja MENKO Tahun 2025
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang

LEVEL MENKO				LEVEL ESELON I			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Metode <i>Cascading</i>	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Frekuensi
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	<i>Direct</i>	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang yang Adil dan Berkelanjutan	Presentase Capaian Target Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang	100%	Tahunan
Terwujudnya Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	<i>Direct</i>	Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang yang Berkualitas	Presentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	Tahunan
	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1	<i>Indirect</i>		Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, Tata Ruang	3,1	Tahunan
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan	Indeks Reformasi Birokrasi	91,1	<i>Indirect</i>	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan	Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi	91	Tahunan

Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan			Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	91	Tahunan
					Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang		

Sumber. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Tahun 2025

2.4. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang didasarkan pada mandat utama yang bersumber dari arahan langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra). Arahan ini disusun dalam bentuk direktif yang menjadi acuan strategis bagi seluruh unit kerja Eselon II di bawah Deputy untuk menyusun langkah kerja konkret guna mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan kewilayahan, agraria, dan tata ruang yang bersifat lintas sektoral dan berdampak luas terhadap agenda pembangunan nasional.

Direktif Menko tersebut dijabarkan ke dalam isu-isu prioritas yang harus ditangani oleh Deputy, dan selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penetapan indikator kinerja utama (IKU) di masing-masing unit. Dengan demikian, pendekatan pengukuran kinerja Deputy tidak hanya bersifat administratif dan prosedural, tetapi bersandar langsung pada urgensi penyelesaian isu-isu aktual dan strategis yang muncul di lapangan. Artinya, keberhasilan Deputy dalam mengatasi isu-isu tersebut menjadi tolok ukur utama dalam penilaian efektivitas dan kebermanfaatan program kerja yang dijalankan.

Secara umum, kinerja Deputy diukur berdasarkan tiga sasaran strategis utama, yaitu:

1. Terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang yang merata dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang yang berkualitas; dan
3. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan efisien.

Ketiga sasaran tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah indikator kinerja, antara lain:

1. Persentase capaian target pembangunan bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
2. Persentase penyelesaian isu strategis yang diamanatkan oleh Menko kepada Deputy;

3. Indeks kepuasan layanan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan;
4. Nilai Reformasi Birokrasi melalui Zona Integritas (ZI); dan
5. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Dalam implementasinya, proses pengukuran kinerja dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat Deputy. Unit ini bertugas menghimpun dan memvalidasi bukti dukung capaian kinerja dari masing-masing Asisten Deputy sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi kinerja juga dikaitkan secara langsung dengan output nyata dari setiap kegiatan, seperti tersusunnya peraturan, kebijakan strategis, policy brief, atau laporan analisis yang secara langsung menjawab isu-isu yang telah diarahkan oleh Menko.

Model pengukuran kinerja berbasis penyelesaian isu strategis ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam merespons dinamika kebijakan nasional. Deputy tidak hanya terjebak pada target numerik tahunan, tetapi juga diarahkan untuk terus responsif, adaptif, dan solutif dalam mengatasi tantangan pembangunan di berbagai wilayah, termasuk kawasan tertinggal, perbatasan, dan pesisir.

Dengan demikian, pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang merupakan proses yang holistik dan berorientasi hasil (result-oriented), yang berlandaskan pada arahan strategis Menko sebagai pengendali utama pembangunan lintas sektor kewilayahan. Model ini menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa setiap kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang benar-benar memberi dampak terhadap percepatan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam implementasi berbagai program strategis. Evaluasi dilakukan terhadap lima unit Eselon II, yaitu Asisten Deputy (AD) 1 hingga AD5, yang masing-masing memiliki ruang lingkup kerja berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung pencapaian target nasional. Berikut adalah analisis mendalam dari masing-masing unit kerja:

1. Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria berfokus pada pelaksanaan kebijakan strategis tata ruang dan agraria, terutama melalui Kebijakan Satu Penataan Ruang (*One Spatial Planning Policy/OSPP*) dan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy/OMP*). Kinerja AD1 pada triwulan ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan strategis telah dilaksanakan secara efektif. Rapat koordinasi lintas eselon dan penyusunan draft awal Peraturan Presiden (Perpres) OSPP telah dilaksanakan sebagai langkah awal implementasi kebijakan tata ruang terpadu yang mencakup integrasi matra darat, laut, udara, dan bawah tanah.

Selain itu, Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria juga aktif dalam menyusun daftar inventarisasi masalah pelaksanaan OMP serta memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Penanganan isu strategis seperti pengendalian alih fungsi lahan sawah dan penyelesaian sengketa tanah menjadi

indikator keberhasilan dalam mendorong reformasi agraria yang berkeadilan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti belum terlaksananya penyusunan draft awal Perpres untuk OMP, yang mengharuskan adanya revisi rencana aksi. Meskipun demikian, Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria telah menunjukkan komitmen tinggi dalam proyek strategis seperti penyusunan kajian kebijakan pembangunan *Giant Sea Wall*, yang memperkuat posisi Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria dalam mendukung pembangunan nasional berbasis tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim.

2. Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I mencatatkan capaian positif dalam mendukung pemerataan pembangunan melalui pendekatan spasial dan kebijakan sistem administrasi pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi. Beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan mencakup pembentukan *steering committee* ILASP, penyelarasan *Area of Interest* pemetaan, serta penyusunan peraturan tata ruang wilayah perairan darat dan Waduk Cirata. Hal ini mencerminkan keterpaduan antara pengelolaan data spasial dan pembangunan infrastruktur yang berbasis wilayah.

Selain aspek teknis, Asisten Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I juga memfasilitasi penyusunan peraturan terkait pengelolaan data pembangunan yang menjadi rujukan utama bagi produksi dan pemanfaatan data pembangunan berkelanjutan. Namun, penetapan izin prakarsa dan pembentukan panitia antar kementerian masih tertunda dan memerlukan penjadwalan ulang pada triwulan berikutnya.

Tim validator memberikan catatan agar seluruh aktivitas disesuaikan dengan efisiensi anggaran dan integrasi program yang lebih baik, mengingat pentingnya peran Asisten Deputi Bidang Pemerataan

Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I dalam mendukung target RPJMN dan program strategis nasional di wilayah prioritas pembangunan.

3. Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II memainkan peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan wilayah, sektor agraria, dan tata ruang pada skala strategis. Keberhasilan Asisten Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II tercermin dalam penyusunan policy brief untuk KEK Tanjung Lesung, pengembangan kawasan Kertajati, serta dukungan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya.

Inisiatif strategis seperti pengembangan *Shipping Investment Trust (SIT)* dan kajian terhadap dampak kenaikan muka air laut juga menambah bobot peran Asisten Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II dalam menjawab tantangan pembangunan wilayah di tengah isu perubahan iklim dan ketahanan infrastruktur. Namun, beberapa kegiatan monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal dan masih berada dalam tahap penyesuaian rencana aksi.

Konsistensi dalam implementasi dan pelaporan menjadi tantangan utama, dan ke depan perlu diperkuat tata kelola program, serta pengendalian mutu pelaksanaan agar setiap kebijakan yang disusun dapat diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.

4. Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi menunjukkan performa yang solid dalam mendukung penguatan daya saing kawasan perdesaan dan transformasi kawasan transmigrasi. Program *Blue Innovative Start-up Acceleration (BISA)* menjadi terobosan penting dalam mendorong ekonomi biru dan ketahanan masyarakat perdesaan melalui kolaborasi multi-

pemangku kepentingan. Penetapan batas desa dan penyusunan dokumen kebijakan transmigrasi turut memperkuat fondasi tata kelola kawasan secara inklusif.

Transformasi kawasan transmigrasi prioritas nasional ditandai dengan kegiatan substansial seperti penyusunan cetak biru, naskah urgensi perubahan Perpres No. 50/2018, serta pembentukan pokja penyelesaian isu lahan. Meski sebagian kegiatan masih dalam tahap awal penyusunan dokumen, hal ini menunjukkan progres signifikan menuju implementasi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Asisten Deputi Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi telah berhasil menunjukkan orientasi program yang adaptif terhadap tantangan kawasan dan mampu menyatukan berbagai sektor untuk mendukung integrasi pembangunan desa dan kawasan transmigrasi.

5. Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal menunjukkan keseriusan dalam memfasilitasi pembangunan pada kawasan 3T dan pesisir yang selama ini menjadi wilayah dengan ketimpangan pembangunan cukup tinggi. Inisiatif seperti pengembangan kawasan Pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) sebagai titik ekonomi baru, serta integrasi pengembangan kawasan pesisir Semarang dan Yogyakarta dengan sistem transportasi publik massal, menandai lompatan besar dalam pendekatan pembangunan wilayah yang inovatif.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal juga aktif dalam pengumpulan dan sertifikasi data pulau-pulau kecil terluar, serta pengelolaan perairan darat melalui pilot project di Waduk Cirata. Program sosial seperti Makan Bergizi Gratis di perbatasan dan pengembangan angkutan udara perintis memperlihatkan

pendekatan pembangunan yang tidak semata berbasis infrastruktur, melainkan juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Kehadiran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Surabaya Waterfront Land menambah bobot kontribusinya dalam pembangunan ekonomi berbasis kawasan. Pendekatan holistik ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya soal pemerataan fisik, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ketahanan wilayah.

3.2. Analisa Keuangan

Sebagai bagian dari upaya optimalisasi penggunaan anggaran dalam rangka mendukung efektivitas program dan kegiatan, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang terus berkomitmen dalam memastikan bahwa realisasi anggaran dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan I, sebagai langkah strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Deputi telah mengajukan tambahan anggaran melalui mekanisme buka blokir sebesar Rp 3 miliar. Pengajuan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan relaksasi guna memastikan bahwa berbagai program koordinasi kebijakan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dapat berjalan secara optimal. Hingga saat ini, usulan relaksasi anggaran tersebut masih dalam proses penelaahan di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Dengan adanya usulan relaksasi ini, kami optimis dapat memaksimalkan capaian output pada program koordinasi kebijakan yang menjadi prioritas. Ketersediaan anggaran tambahan akan

memberikan ruang lebih dalam menjalankan program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang. Selain itu, penguatan koordinasi antar-stakeholder juga menjadi salah satu aspek yang didorong guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran, kami tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025. Oleh karena itu, Deputi memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan prioritas nasional serta sejalan dengan upaya percepatan pembangunan yang berkeadilan.

Adapun strategi yang diterapkan dalam mendukung optimalisasi realisasi anggaran antara lain:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perencanaan anggaran guna memastikan bahwa setiap alokasi yang diajukan telah sesuai dengan kebutuhan program yang bersifat prioritas.

2. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka mendukung efisiensi belanja, kami menerapkan langkah strategis seperti pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja, penguatan sinergi dengan mitra strategis, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

3. Monitoring dan Evaluasi yang Ketat

Memastikan bahwa setiap tahapan realisasi anggaran diawasi secara ketat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya inefisiensi serta memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mempercepat pencapaian target pembangunan.

Kami menyadari bahwa tantangan dalam realisasi anggaran merupakan hal yang tidak terhindarkan. Namun, dengan penerapan strategi yang tepat serta komitmen untuk terus berinovasi dalam tata kelola anggaran, kami optimis dapat menghadapi tantangan tersebut secara efektif.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, kami akan terus menyampaikan laporan perkembangan realisasi anggaran secara berkala serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan demikian, diharapkan seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui berbagai upaya tersebut, kami menegaskan kembali komitmen untuk terus mendorong efektivitas belanja negara dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, khususnya di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang. Dengan dukungan serta kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, optimis bahwa realisasi anggaran dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mempercepat tercapainya visi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3.3. Analisa Sumber Daya

3.3.1. Pegawai

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang tahun 2025 memiliki pegawai berjumlah 70 orang pegawai, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 57 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 13 orang. Jumlah Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 30 orang.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 dipimpin oleh seorang Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dimana penempatan pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi Nomor 32.2/SES MENKO.02/KP.09.06/XII/2.024 Tanggal 03 Desember 2024, dengan perincian dalam Gambar. 15. Dibawah ini.

17	SEKRETARIAT DEPUTI	
	JPT Pratama	1 Org
	Madya	2 Org
	Muda	3 Org
	Pertama	4 Org
	Pelaksana	1 Org
	PPPK	6 Org

13	ASDEP 1	
	JPT Pratama	1 Org
	Madya	3 Org
	Muda	0 Org
	Pertama	2 Org
	Pelaksana	5 Org
	PPPK	2 Org

10	ASDEP 2	
	JPT Pratama	0 Org
	Madya	3 Org
	Muda	0 Org
	Pertama	3 Org
	Pelaksana	3 Org
	PPPK	1 Org

10	ASDEP 3	
	JPT Pratama	1 Org
	Madya	1 Org
	Muda	0 Org
	Pertama	4 Org
	Pelaksana	3 Org
	PPPK	1 Org

9	ASDEP 4	
	JPT Pratama	1 Org
	Madya	1 Org
	Muda	1 Org
	Pertama	3 Org
	Pelaksana	2 Org
	PPPK	1 Org

9	ASDEP 5	
	JPT Pratama	1 Org
	Madya	1 Org
	Muda	1 Org
	Pertama	2 Org
	Pelaksana	3 Org
	PPPK	1 Org

*Notes: terdapat penempatan 1 orang Pramubakti pada Sekretariat Deputi
Gambar 3 Matriks Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan
Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang

Adapun PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. PNS berdasarkan pangkat dan golongan dalam
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah,
Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

Pangkat/Golongan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	3
Pembina Tingkat I (IV/b)	10
Pembina (IV/a)	6
Penata I (III/c)	2
Penata Tingkat I (III/d)	6
Penata Muda Tingkat I (III/b)	16
Penata Muda (III/a)	14
Total	57 Orang

Sedangkan Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025 berdasarkan pendidikan terakhir dalam data kepegawaian Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan
Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang Tahun 2025

Uraian	Jumlah Pegawai
PNS	
SMA	1
Strata Satu	30
Strata Dua	26
Starata Tiga	1
Total	57 Orang
TKK	
Diploma	1
Strata Satu	11
SMK	1
Total	13 Orang

3.3.2. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep Activity Based Workplace (ABW)

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang menerapkan efisiensi Ruang Kerja Berkonsep *Activity Based Workplace* (ABW), yang merupakan konsep ruang kerja dimana setiap individu pegawai tidak mendapatkan alokasi *workstation/desk* secara khusus,

dengan tujuan mengubah budaya organisasi yang sektoral menjadi kolaboratif, mendorong komunikasi vertikal yang lebih cair, mendorong efisiensi penggunaan ruang kantor, daya kreasi, ide, dan inovasi serta meningkatkan produktivitas (Tabel 3.34). Prinsip-prinsip dari ABW antara lain *Trust Building*, *Work-life Balance*, *Collaborative*, *Clean Desk*, dan *No Dedicated Seat*.

Tabel 6. Efisiensi Ruang Kerja Berkonsep ABW

No	Uraian	Volume (Ruang)	Keterangan
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan dan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang			Lantai 7
1.	Ruang Deputi	1	Sebelah Selatan
2.	Ruang Asisten Deputi	5	Sebelah Selatan
3.	Ruang Sekretaris Deputi	1	Sebelah Selatan
4.	Ruang Jabatan Fungsional Ahli Madya	14	Sebelah Utara
5.	Ruang Jabatan Fungsional Muda, Pertama, dan Staf Lainnya	1	Sebelah Utara
6.	Ruang Rapat Dewa Ruci (Ruang Rapat Eselon I dan II)	1	Sebelah Selatan
7.	Ruang Rapat Kecil (Umum)	1	Sebelah Utara
8.	Ruang Pengaduan Layanan Masyarakat	1	Sebelah Selatan
9.	Ruang Pantry (Dapur)	1	Sebelah Timur
10.	Toilet	5	Sebelah Barat

BAB IV

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap lima bidang penugasan penyelesaian isu di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, dapat disimpulkan bahwa:

- | 1. Capaian | Kinerja | Umum | Positif |
|---|---------|------|---------|
| <p>Secara keseluruhan, kinerja masing-masing unit Eselon II menunjukkan kemajuan signifikan dalam pencapaian target strategis yang selaras dengan RPJMN 2020-2024 serta prioritas nasional tahun 2025. Pendekatan lintas sektor dan keterlibatan multi-stakeholder telah menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sinergi pembangunan wilayah.</p> | | | |
| <p>2. Kesiapan Kebijakan dan Peraturan Mendukung Transformasi Wilayah
Penyusunan regulasi seperti draft Perpres OSPP dan OMP, cetak biru transformasi kawasan transmigrasi, serta kajian-kajian strategis di sektor agraria dan tata ruang, menunjukkan bahwa Kedeputian telah membangun fondasi normatif dan kelembagaan yang kuat untuk mendukung pemerataan pembangunan.</p> | | | |
| <p>3. Perlu Perbaikan dalam Konsistensi Implementasi Renaksi
Meskipun banyak capaian positif, sejumlah kegiatan masih belum terlaksana dan memerlukan revisi rencana aksi. Hal ini menandakan perlunya penguatan aspek implementasi, termasuk pengendalian waktu, penjadwalan ulang, serta penguatan koordinasi antar unit dan mitra kerja lintas kementerian.</p> | | | |
| <p>4. Efisiensi dan Akuntabilitas Jadi Titik Tekan Validasi
Dalam seluruh berita acara, Tim Validator secara konsisten menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pertanggungjawaban hasil. Evaluasi ini mendorong Kedeputian untuk lebih selektif dalam pelaksanaan program dan memastikan bahwa seluruh kegiatan memberikan output dan outcome yang konkret.</p> | | | |

5. Komitmen terhadap Pemerataan yang Inklusif Capaian di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan pesisir menunjukkan perhatian yang kuat terhadap keadilan spasial dan sosial. Strategi pembangunan tidak hanya berbasis fisik, tetapi juga mempertimbangkan akses layanan dasar dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

3.2. Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Kendala-kendala ini bersifat struktural, teknis, hingga koordinatif, yang memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan agar tidak menghambat pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.

Kendala utama yang dihadapi adalah terkait keterbatasan waktu dalam menyesuaikan dinamika arahan Menko yang bersifat cepat dan situasional. Beberapa isu strategis yang muncul mendadak seperti penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan infrastruktur kereta cepat, kawasan transmigrasi prioritas, dan integrasi kebijakan ruang wilayah laut dan darat, membutuhkan fleksibilitas sumber daya dan proses pengambilan keputusan yang cepat.

Di samping itu, beberapa kegiatan masih tergantung pada kesiapan kementerian/lembaga mitra. Proses validasi data spasial sektoral, sinkronisasi kebijakan lintas instansi, hingga pembentukan tim teknis antar-kementerian memerlukan waktu koordinasi yang tidak singkat, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan rencana aksi pada sejumlah kegiatan prioritas. Misalnya, proses harmonisasi dokumen tata ruang laut dan darat dalam skema One Spatial Planning Policy (OSPP) masih terhambat perbedaan interpretasi teknis antar instansi.

Terdapat pula kendala administratif terkait pengadaan kegiatan dan pengelolaan anggaran pada awal tahun anggaran. Beberapa kegiatan

strategis, khususnya yang bersifat lintas daerah dan memerlukan verifikasi lapangan, tertunda pelaksanaannya karena proses administrasi anggaran yang belum sepenuhnya rampung di bulan Januari.

Terakhir, terbatasnya sumber daya manusia dan beban kerja tinggi pada beberapa Asisten Deputi menjadi tantangan tersendiri. Banyaknya isu prioritas yang harus ditangani secara simultan berdampak pada optimalitas pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, terutama dalam aspek dokumentasi bukti dukung kinerja dan pemutakhiran data evaluasi.

3.3. Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Sebagai respons atas berbagai kendala yang dihadapi pada Triwulan I, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang telah menyusun tindak lanjut yang terarah untuk memastikan kelancaran dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Tindak lanjut ini dilakukan melalui penguatan perencanaan, koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

Pertama, dalam rangka mengatasi kendala waktu dan dinamika arahan pimpinan yang cepat, Deputi bersama seluruh unit Asisten Deputi akan meningkatkan mekanisme *early warning system* melalui agenda *weekly briefing* antar unit. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi dan menindaklanjuti arahan baru Menko secara cepat dan terkoordinasi.

Kedua, guna memperkuat koordinasi lintas instansi, akan dilakukan penjadwalan ulang kegiatan strategis dengan menetapkan target waktu yang lebih realistis dan penguatan kapasitas tim lintas kementerian. Koordinasi sektoral seperti dalam integrasi OSPP, pengendalian alih fungsi lahan, dan sinkronisasi pemanfaatan ruang akan difasilitasi lebih aktif melalui forum koordinasi teknis triwulanan.

Ketiga, Deputi akan melakukan penyesuaian jadwal kegiatan lapangan dan pelaksanaan dokumen kebijakan agar selaras dengan kesiapan dukungan anggaran dan pengadaan, terutama kegiatan yang sempat tertunda di awal

tahun. Hal ini termasuk revisi timeline kegiatan berbasis output agar tetap menjamin keberlanjutan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Keempat, guna mengatasi kendala internal SDM dan beban kerja, akan dilakukan redistribusi penugasan internal serta percepatan pelatihan teknis dan manajerial bagi tim fungsional. Sekretariat Deputi juga akan mengembangkan sistem pelaporan digital terpadu untuk mempercepat proses validasi dan pengumpulan bukti kinerja secara efisien.

Terakhir, seluruh hasil evaluasi kendala dan tindak lanjut ini akan dilaporkan secara berkala dalam bentuk review kinerja internal bulanan dan digunakan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja Triwulan II. Deputi juga berkomitmen untuk terus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis isu strategis yang bersifat solutif dan berorientasi hasil.